

## **ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN**

Komentar terhadap makalah **Olahraga, Kebijakan, Politik : Tinjauan dari Perspektif Sejarah dan Sosiologi** oleh **Prof. Dr. Rusli Lutan**

### **Pendahuluan**

*“Ibarat anak ayam kehilangan induknya”*. Itulah ungkapan bagi dunia olahraga Indonesia ketika Departemen Pemuda dan Olahraga dibubarkan atau mungkin *“dilikuidasai”* karena dianggap tidak becus (mampu) mengurus dirinya, kata pemegang pucuk pimpinan saat itu, terlebih meningkatkan prestasi olahraga di tingkat internasional.

Ada lembaga yang menguruspun sudah susah mengelolanya, apalagi tidak ada. Jangan berharap terlalu jauh untuk bisa mengibarkan bendera bangsa di even internasional, meski itu tuntutan masyarakat yang dipaksa dicetuskan Ibu Negara. Wajar bila itu terjadi, sebab ketidaktahuan bagaimana berproses membangun prestasi olahraga dengan kebutuhan selalu “memelihara kesuksesan di karier politik” berdampak pada pemaksaan untuk terus memelihara dan meningkatkan citra diri. Olahraga dan masyarakatnya hanya dianggap sebagai salah satu sumber dukungan bagi kelanggengan pemerintah, tidak peduli terhadap nilai, seperti halnya dikemukakan Robert L. Simon (1991) bahwa seberapa jauh suatu kelompok atau pemerintah menaruh perhatian terhadap olahraga bergantung pada nilai yang dihayatinya sehubungan dengan kegiatan itu.

Perjalanan olahraga dan pendidikan jasmani semenjak diproklamirkannya kemerdekaan untuk berdaulat, ternyata masih berkutat dengan perubahan atas dasar keinginan dan kepentingan penguasa. Dari orde lama sampai orde baru dan sekarang masa reformasi, nyatanya prestasi olahraga secara umum makin merosot. Ini dibuktikan dari penurunan prestasi di Sea Games Brunei dan Kuala Lumpur. Berbeda dengan masa orde baru antara 1980-an sampai 1990-an, kita masih bisa membusungkan dada. Kemungkinan besar terkait erat dengan

perubahan sosial dan perkembangan ekonomi pada saat itu memang sangat mendukung dan memungkinkan.

Sekarang yang membuat prestasi olahraga mandeg bahkan cenderung menurun akibat kurang mendapat sentuhan kebijakan politik. Dokter yang diperlukan (para profesional) untuk mengobatinya masih dilangkahi birokrat, yang nyata-nyata kurang paham mengurus olahraga. Hanya mampu “berintruksi” atas dasar kebijakan pimpinan.

### **Dampak Sistem Politik dan Ekonomi Terhadap Olahraga**

Karena *paternalistik* begitu kuat, sampai sekarang di lingkungan orang tua (dituakan) masih ter(di)pelihara, semua bidang dikelola menyerupai pola hidup itu. Termasuk olahraga, yang malah berdampak terciptanya “Asal Bapak Senang”. Dunia olahraga dikelola seperti itu. Orang tualah yang membuat keputusan menentukan, meski kurang tepat dengan perkembangan di dunia lain. Yang penting keinginan pimpinan terpenuhi tanpa mau tahu modal, perjalanan, perjuangan untuk mencapainya. Pokoknya medali emas sebanyak mungkin. Seperti di PORDA 2003 Indramayu. Banyak pengakuan atlet dan pelatih yang dipaksa oleh bupati melalui pengurus Pengcab untuk selalu memenangkan medali emas tanpa tahu kekuatan lawan yang tidak sebanding, biaya dan fasilitas berlatih kurang, banyak keluhan tanpa solusi dan seabreg masalah pembinaan.

Dapatlah dikatakan apabila perkembangan olahraga tergantung dari selera pemegang kekuasaan. Korea telah berhasil menanamkan citra diri melalui olimpiade dan *world cup*, meski produk olahraga dalam negerinya masih kalah bersaing dengan produk luar. Dunia tidak memandang lagi Asia sebagai pecundang dalam segala hal. Prestasi internasional Cina dan Jepang membuktikan bahwa ketika pemerintah yang berkuasa begitu solid untuk membangun dunia olahraga maka hanya prestasi yang mampu diraih. Sejarah telah membuktikan kejayaan dan keruntuhan olahraga Uni Soviet, puncak kejayaan orde lama zaman Bung Karno melalui Asian Games di Jakarta pada 1962.

Contoh kecil begitu kuatnya pemegang kekuasaan mempengaruhi aktivitas olahraga adalah apa yang terjadi di pedesaan. Di Kabupaten Majalengka, setiap calon lurah atau kuwu (kepala desa) mencari dukungan suara pada masyarakat olahraga, para pemuda yang mayoritas pelaku olahraga, pembina dan penonton. Aktivitas olahraga, misalnya sepak bola dan bola voli diselenggarakan sebagai ajang promosi. Bukti lain adalah apabila kepala desa mencintai olahraga, dukungannya begitu kuat. Difasilitasinya berbagai aktivitas olahraga terlebih cabang olahraga kesukaannya. Setiap waktu tertentu diselenggarakan kejuaraan secara rutin.

Yang sering menjadi pertanyaan adalah “apakah perkembangan olahraga sebagai alat politik pemerintah untuk tujuan tertentu atau olahraga hanya terkena imbas kebijakan politik?”.

### **Perubahan Sosial dan Budaya**

Menarik untuk disimak apa yang dikemukakan Prof. Rusli Lutan dalam makalah Olympic movement and Sport Culture di International Olympic Fair Seoul 2001, bahwa :

When we discuss the concept of culture, we will swim in the sea of abstract of symbolic meaning, or we will plunge into symbolic world. In my career of some 32 years as a physical educator, either as a regular member the faculty or as a visiting professor, I can conclude from those experiences that the most of our attention and our professional practices in sport and physical education tend to focus on micro level, both in teaching and training process. Our program does not response to or has a loose connection with the large context, whether political, economic, social and cultural milieu.

Pergeseran nilai-nilai luhur yang terjadi di masyarakat, misalnya Sunda, berdampak pada perubahan persepsi terhadap cara hidup. Berubah pula sikap dan cara pandang terhadap suatu fenomena. Misal orang Sunda yang sudah lupa akan *tata, titi, duduga peryoga* (tata cara berperilaku dengan siapa dan bagaimana harus berlaku) mulai kehilangan karakter seperti ramah terhadap siapapun, terlebih pada orang tua dan tamu. Dampaknya pada pola pikir yang didorong oleh kebebasan bertingkah “semau gue”, yang katanya adaptasi pada budaya negara maju dengan

harapan negara inipun bisa maju seperti mereka. Tetapi nyatanya perilaku yang terlihat cenderung menghalalkan segala cara untuk menang, merusak apapun yang berbau lawan ketika kekalahan didapat (kasus yang sering menimpa Persib di era reformasi).

Penerimaan budaya luar tanpa filter memunculkan “*hedonisme*” sebagai pengganti kerja keras ketika mengisi waktu luang, karena tuntutan di sekitar “mengisi perut”. Tetapi waktu luang seperti apa yang dimiliki warga negara ini tatkala krisis multi dimensi melanda dengan melahirkan pengangguran berjuta-juta. Mereka selalu memiliki “waktu luang” yang sangat tidak terbatas dengan frustrasi dan apatis pada apapun yang berbau kebijakan pemerintah. Berbeda dengan segolongan kecil yang disibukan setiap harinya dengan bisnis dan membuat polemik yang “dibisniskan” sebagai golongan menengah ke atas. Mereka begitu terganggu ketika didapatinya *leisure time*. Diisinya dengan berbagai bentuk aktivitas menggerakkan badan dengan harapan refresh diperoleh untuk mengawali rutinitas kesibukan di hari mendatang. Meski pemanfaatan waktu luang dengan olahraga belum begitu sesuai karena belum dikelola secara profesional, apalagi krisis tidak kunjung henti maka pandangan “*rawan*” terhadap lingkungan sosial menjadi salah satu penghambatnya. Ini pun berdampak pada pengacauan makna waktu luang karena mayoritas tidak memiliki pekerjaan tetap sebagai buah krisis sosial dan ekonomi, yang menggeser budaya Indonesia dengan budaya luar yang disebut sebagai budaya maju.

Persepsi masyarakat terhadap olahraga dan pendidikan jasmani masih berakar pada anggapan sebagai aktivitas fisik belaka yang membuat capek tanpa memperbaharui aspek lain dalam tubuh (emosi, sikap, sosial). Bahkan cenderung mengatakan bahwa olahraga **biang kerok kerusuhan** (atau mungkin kerusuhan dalam olahraga adalah akumulasi kekecewaan dalam kehidupan sosial dan olahraga dijadikan media pengungkapannya). Masyarakat masih menghargai hasil berupa produk sebagai juara yang meraih medali emas tanpa melihat kualitas lawan. Itupun dengan ketimpangan yang besar. Berapa medali emas yang dihargai

untuk setiap even seperti Porda, PON, Sea Games, Asian Games, Olimpiade atau *kejuaraan dunia yang sepi bonus (misal angkat berat dan binaraga)*. Sekali lagi produk yang menjasi pemenang, apatis terhadap proses.

### **Keterlibatan Pemerintah**

Apapun produk kebijakan pemerintah adalah untuk perbaikan prestasi olahraga dan pendidikan jasmani. Hanya saja pelaksanaannya terkadang di luar prosedur. Dan yang lebih tidak dipahami lagi adalah keterlibatan orang-orang profesional tergeserkan oleh kekuatan “suara masyarakat” di gedung dewan atau dari istana negara. Mungkin tidak berlaku “right man on the right job”.

Keterlibatan pemerintah dalam bentuk perilaku politik terhadap olahraga yang tidak proporsional, seperti dikemukakan Supandi (1990) dari Peter McIntosh (1963) berdampak pada terlalu banyak interaksi dan karena merendahkan atau menurunkan nilai salah satunya. Injeksi olahraga terlalu banyak kedalam politik akan mengurangi kegiatan manusia yang serius menjadi kekanak-kanakan, sebaliknya bila politik dimasukan ke olahraga dalam ukuran sangat besar akan merusak unsur permainannya sehingga mengubah hakekat kewajaran olahraga itu sendiri.

Yang pada akhirnya terjadi kemelut, kekacauan, saling menyalahkan siapa yang harus bertanggung jawab ?

### **Perlindungan kepada warga masyarakat.**

Akibat ketidakjelasan (atau mungkin disamarkan) kebijakan pemerintah mengurus olahraga yang dilaksanakan kurang profesional (karena orangnya) akibatnya salah kaprah. Pelaksananya jelas, ketika dimintai tanggung jawab malah saling menuding dan saling tunjuk kambing hitam. Contohnya dalam kasus tinju yang beberapa kali menewaskan atletnya karena pertandingan yang digelar di salah satu televisi swasta dilaksanakan terlalu larut malam. Badan yang mencoba melindungi malah balik saling tuding melempar tanggung jawab.

### **Menjaga dan meningkatkan fitness dan kemampuan fisik.**

Yang terjadi adalah masih retorika belaka, memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Tanpa fasilitas menunjang, tanpa penyebaran keilmuan. Penunjukkan pelakasana lebih karena kedekatan dan upaya memelihara kekuasaan, bukan pada ahlinya. Proses dan produk tidak sesuai dengan yang dijanjikan dan harapan masyarakat. Malah biaya untuk itu terlampau mahal.

### **Mengangkat prestise.**

Ketidakseimbangan penghargaan yang diberikan karena level yang membedakan sering berdampak pada prestasi sesaat. Bagaimana tim junior sepak bola usia 16 tahun (era Ali Sunan, dkk) menjadi juara Asia pada tahun 1986, tetapi tidak muncul di tingkat senior untuk ikut di world cup 1990. Yang terjadi kecaman publik melebihi kebanggaan yang diraih para atlet berprestasi. Apakah yang salah proses pembinaan tingkat lanjut ? Bangsa ini masih memegang teguh olahraga dalam bentuk konsep harus menang dan tidak boleh kalah. Sehingga pola pikir, kemampuan dan keharusan menang di atas segalanya.

### **Meningkatkan dukunga politis.**

Olahraga sebagai aktivitas yang mengundang banyak masa dimanfaatkan sebagai media menunjukkan kemampuan, kesanggupan menanggulangi beban kerja, mencari simpatik dan menguatkan eksistensi. Dalam sebuah literturnya Jay J. Coakley (1990 : 311) mengungkapkan salah satu contoh adalah :

Former president Ronald Reagan was very good at using sport to has political advantage. He seldom missed opportunities to be seen or connected with highly visible championship teams during his 8 years in office. As sport has become more visible in many societies, more political figures are using sport to generate political support.

### **Mendorong perkembangan ekonomi.**

Even olahraga tidak hanya milik pelatih, pembina dan atlet, melainkan semua orang terlibat didalamnya tanpa harus mengerti makna dan nilai olahraga itu sendiri. Ini berdampak pada semua sektor kehidupan masyarakat, baik sosial, ekonomi, maupun stabilitas keamanan. Contoh di Porda IX Indramayu.

Bagaimana keberanekaragaman kultur bergabung dalam suatu kompetisi, berapa biaya yang dibangun untuk melengkapi fasilitas, berapa banyak pendatang (pedagang) yang mengadu nasib saat even dilangsungkan. Ibarat lahan pekerjaan musiman untuk semua orang yang terlibat didalamnya. Perekonomian di Jawa Barat seolah terdongkrak meski sesaat.

### **Kesimpulan**

Dukungan kebijakan politik yang berpihak, perekonomian stabil dan berkembang, disertai persepsi masyarakat terhadap olahraga semakin sesuai dengan makna dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya, maka berharaplah dengan pasti bahwa olahraga akan berkembang untuk mencetak prestasi. Itu kita peroleh dari perkembangan sejarah olahraga sebagai gambaran nyata (bukti) yang tidak bisa dihapus dengan apapun, sebagai upaya menguatkan akar kebudayaan sebagai insan yang mencintai “gerak”. Seperti yang dikemukakan Rusli Lutan (2002) bahwa , *“sekiranya olahraga pada umumnya dilaksanakan dengan baik dan terbimbing, maka olahraga dapat digunakan sebagai koreksi budaya. Sebab nilai inti dari olahraga, selain persaudaraan adalah menghargai hasil sebagai produk usaha, bukan karena kebetulan atau untung-untungan”*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Jay J. Coakley (1990), *Sport in Society : Issues and Controversies*, fourth edition : Times Mirror/Mosby College Publishing, Toronto.
- Rusli Lutan (2002), *Olahraga, Kebijakan, Politik : Perspektif Sejarah dan Sosiologi*, makalah Seminar Nasional Haornas XIX “Olahraga dan Integrasi bangsa”, Bali Room Hotel Indonesia ; Ditjen Olahraga Depdiknas.
- Rusli Lutan (2001), *Olympic Movement and Sport Culture* ; International Olympic Fair Seoul 2001 ASPES Sport Science Symposium.
- Rusli Lutan , Amung Ma'mun (1999), *Sosiologi Olahraga*, Depdikbud, Ditjen Dasmen; Jakarta.
- Supandi, Kemal Johana (1990), *Pengantar Sosiologi Olahraga*, FPOK IKIP Bandung.